

12-1-2005

Kearifan dalam Bahasa Sebuah Tinjauan Pragmatis terhadap Profil Kebahasaan Media Massa pada Masa Pasca Order Baru

F X. Rahyono

Universitas Indonesia, rahyono@hotmail.com

Irzanti Sutanto

Universitas Indonesia

Ratnawati Rachmat

Universitas Indonesia

Dwi Puspitorini

Universitas Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/hubsasia>

Recommended Citation

Rahyono, F. X., Sutanto, I., Rachmat, R., & Puspitorini, D. (2005). Kearifan dalam Bahasa Sebuah Tinjauan Pragmatis terhadap Profil Kebahasaan Media Massa pada Masa Pasca Order Baru. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 46-56. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.118>

This Original Research Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Makara Human Behavior Studies in Asia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KEARIFAN DALAM BAHASA SEBUAH TINJAUAN PRAGMATIS TERHADAP PROFIL KEBAHASAAN MEDIA MASSA PADA MASA PASCAORDE BARU

F.X. Rahyono, Irzanti Sutanto, Ratnawati Rachmat, dan Dwi Puspitorini

Program Studi Jawa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia
Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

E-mail: rahyono@hotmail.com

Abstrak

“Reformasi Total”, demikianlah sebuah slogan yang dihadirkan dalam wacana publik pada masa pascaorde baru. Kecaman, keluhan, atau kemarahan itu pun hadir di berbagai media wacana, baik dalam dialog formal maupun informal. Pada masa pascaorde baru, memori yang ada pada masyarakat adalah memori tentang peristiwa-peristiwa yang tidak terkendali. Memori itu kemudian terrepresentasikan dalam wacana yang berbunyi “*Reformasi yang kebablasan*”. Sebuah kata, frasa, serta kalimat pada dasarnya berpotensi menampilkan makna referensial maupun kontekstual. Secara pragmatis, sebuah kata, frasa, atau kalimat memiliki kemungkinan untuk menyatakan maksud kearifan atau maksud ketidakarifan. Ketidakarifan – yang dimaksudkan dalam penelitian ini - merupakan tindakan pelanggaran terhadap etika dan etiket yang berlaku di masyarakat. Bagaimana mewacanakan gerakan reformasi secara arif? Perlukah memanfaatkan kosakata ketidakarifan secara produktif dalam wacana publik? Siapakah yang bertanggung jawab dalam menumbuhkembangkan kearifan masyarakat? Kearifan dalam bahasa tidak berkaitan dengan tindakan manipulatif dalam penyampaian informasi. Kearifan dalam bahasa berkaitan dengan strategi pemilihan satuan-satuan bahasa. Kearifan adalah tanggung jawab bersama. Bahasa yang arif tidak akan hadir secara menyeluruh jika pihak-pihak terkait dan segala peristiwa yang dihasilkannya tidak menuju ke kearifan. Kearifan tidak memperdebatkan tuntutan hak dan kebebasan berwacana.

Abstract

The Wisdom of Language A Pragmatic Study on the Profile of the Post-New Order Era Mass Media Language. “Total *Reformasi!*” is the slogan circulated in the public discourse of the post-New Order era. All kinds of condemnation, grievances, and anger have been raised in various discourses, from formal to informal dialogues. In such an era, people’s collective memory is mostly associated with uncontrollable events, and it is eventually represented in the discourse of “the overdosed *Reformasi*” (*Reformasi yang kebablasan*). A word, phrase, and sentence basically have the potential of expressing both referential and contextual meanings. From a pragmatic point of view, a word, phrase, or sentence has a capacity to express either wise or unwise intentions. “Unwise intention” in the context of this research is defined as an act of transgressing or violating the ethics and etiquettes of a society. How can the discourse of *Reformasi* be constructed wisely? Is it necessary to appropriate unwise vocabulary in public discourses? Who holds the responsibility for fostering public wisdom? The wisdom of language has nothing to do whatsoever with manipulative acts in information dissemination. The wisdom of language relates to strategies of choosing certain linguistic features. Wisdom is a collective responsibility. A wise language would not be able to fully exist unless all of the related parties and resulting events make a concerted effort towards wisdom. Wisdom does not involve itself in the tug of war between the right and freedom of participating in discursive formations.

Keywords: wisdom, discourse, pragmatic, information, meaning

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

“Reformasi total”, demikianlah wacana yang produktif diujarkan dan dipublikasikan pada awal masa reformasi

oleh berbagai pihak masyarakat. Dengan berlindung di balik seruan demokrasi dan kebebasan berbicara, setiap anggota masyarakat merasa berhak untuk melakukan tekanan dan penilaian subyektif. Kecaman, keluhan,

atau kemarahan tumbuh subur melalui media dalam bentuk wacana-wacana yang represif.

Perjalanan reformasi total yang hendak dilaksanakan secara demokratis rupanya mampu menekan slogan “*bebas bertanggung jawab*” menjadi “*kebebasan pers/berbicara*”. Slogan, yang merupakan produk era orde baru itu kini seakan-akan telah terhapus dari memori pihak-pihak yang berkepentingan. Pada era reformasi, memori yang lekat pada masyarakat adalah peristiwa-peristiwa yang hampir tidak terkendali. Memori itu kemudian direpresentasikan melalui bahasa dalam wacana yang berbunyi “*Reformasi yang kebablasan*”. Pertimbangan penggunaan kata-kata yang arif, kata sapaan penghormatan kepada para pejabat negara atau pun tokoh masyarakat mulai berkurang dalam wacana di media. Hipotesis yang dapat diajukan adalah: hilangnya memori kearifan atau sikap hormat kemungkinan besar mengakibatkan hilangnya kata-kata arif dan sapaan penghormatan dalam komunikasi publik.

1.2 Penelitian Sejenis Yang Telah Dilakukan

Penelitian sejenis yang telah dilakukan adalah penelitian Anang Santoso (2003) tentang *Bahasa Politik Pasca Orde Baru* dan penelitian Ibnu Hamad (2004) tentang *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*.

Pada dasarnya penelitian Santoso berkenaan dengan pemilihan satuan-satuan linguistik yang dilakukan oleh para elit politik untuk menunjukkan identitas institusional ideologi politik yang dianutnya. Oleh karena pilihan bahasa dan pemaknaannya merupakan pilihan yang sifatnya institusional, maka individu anggota kelompok politik tidak memiliki kebebasan dalam memilih satuan-satuan bahasa sendiri.

Walaupun menggunakan kerangka analisis wacana kritis yang sama dengan Santoso, namun karena tujuan berbeda, maka temuan penelitian Hamad menunjukkan perbedaan yang signifikan. Peran media sebagai komunikator lebih menonjol daripada aspek satuan bahasa sebagai sarana komunikasi verbal yang terwujud dalam teks.

Temuan penting dari penelitian Hamad yang relevan dengan penelitian ini adalah prinsip pemaknaan teks. Sama dengan pemaknaan kosakata pada penelitian Santoso, konteks nonlingual merupakan komponen yang membangun makna. Makna sebuah teks tidak semata-mata dibangun oleh teks sebagai satuan bahasa, namun dibangun pula oleh konteks nonlingual yang melingkupi dan membentuk teks. Konteks nonlingual yang membangun pemaknaan teks pada penelitian Hamad adalah motif-motif media dalam mengonstruksikan realitas.

1.3 Tujuan

Berangkat dari profil kebahasaan yang tumbuh pada era pascaorde baru, serta dengan suburnya sikap-sikap emosional di masyarakat, sejumlah pertanyaan perlu diajukan sebagai masalah penelitian untuk menemukan solusi dan tindakan nyata. Penelitian ini bertujuan menemukan:

1. ketidakarifan yang hadir melalui pilihan satuan-satuan bahasa dalam media massa;
2. satuan-satuan bahasa yang mampu menumbuh-kembangkan kearifan masyarakat; serta
3. otoritas dan/atau pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan bahasa yang berkemungkinan memicu ketidakarifan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengkaji peran bahasa sebagai media komunikasi publik dalam kaitannya dengan kearifan individu dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan-sumbangan berikut:

1. memberikan petunjuk tentang satuan-satuan bahasa yang berpotensi memicu gejolak sosial di masyarakat yang mengarah ke sikap ketidakarifan dan emosional masyarakat;
2. memberikan sumbang-saran kepada pihak-pihak atau otoritas yang terlibat sebagai penentu kebijakan dalam hal pemilihan dan pemanfaatan potensi bahasa dalam wacana komunikasi publik; serta
3. memberikan pertimbangan kepada media massa, otoritas/pejabat publik, dan masyarakat tentang perlunya menumbuhkembangkan kearifan melalui bahasa yang digunakannya.

2. Metode Penelitian

2.1 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan atas kerangka konseptual berikut:

- Bahasa merupakan sistem tanda yang digunakan manusia sebagai sarana komunikasi.
- Bahasa merupakan manifestasi verbal dari ide atau gagasan si penutur yang disampaikan kepada kawan tutur.
- Jika si penutur bertujuan menyampaikan makna kearifan, kawan tutur akan memaknai tuturan tersebut sebagai tuturan kearifan.
- Setiap satuan struktural bahasa (kata, frasa, atau kalimat) memiliki makna yang dibentuk secara referensial maupun secara kontekstual.
- Setiap penutur memiliki peluang untuk memanfaatkan kata secara kontekstual menurut maksud yang ingin disampaikan.
- Makna sebuah wacana dapat dipahami bersama jika partisipan komunikasi mengacu kepada referen, konteks, dan maksud yang sama.

2.2 Acuan Teoretis

Ogden & Richards (1952:11) menampilkan konsep hubungan antara tiga elemen makna, yakni dengan menghubungkan *symbol*, *referent*, dan *thought* atau *reference* dalam bentuk diagram segitiga makna. *Reference* ('konsep/makna') sebuah kata atau ekspresi dibedakan ke dalam dua jenis makna, yakni *referential meaning* 'makna referensial' dan *emotive meaning* 'makna emotif'.

Cruse (1991:1) dalam pembahasan tentang pendekatan kontekstual semantik leksikal menyatakan bahwa:

“... *the semantic properties of a lexical item are fully reflected in appropriate aspects of the relations it contrast with actual and potential contexts. In theory, the relevant contexts could include extra-linguistic situational contexts.*”

Pendekatan kontekstual mengasumsikan bahwa ciri atau “identitas” semantis unsur leksikal itu sepenuhnya dicerminkan oleh kesesuaian hubungannya dengan konteks. Pandangan kontekstual ini mengisyaratkan pula bahwa sebuah kata akan berubah maknanya jika terlepas dari konteks.

Simpulan yang dapat diangkat berdasarkan pandangan referensial dan kontekstual ini adalah bahwa sebuah kata memiliki dua makna, yakni makna referensial dan makna kontekstual. Jika makna referensial dan kontekstual kata yang hadir dalam konteks yang bersangkutan itu sama, maka makna kata tersebut bersifat semantis. Jika makna referensial dan kontekstual kata yang hadir dalam konteks yang bersangkutan itu berbeda, maka makna kata tersebut bersifat pragmatis.

Cruse (2000:6) menyatakan bahwa dalam komunikasi terdapat tiga aspek makna, yakni (1) *speaker’s meaning*, (2) *hearer’s meaning*, dan (3) *sign meaning*. *Speaker’s meaning* berkenaan dengan maksud si pembicara/penulis, *hearer’s meaning* berkenaan dengan makna yang ditangkap oleh kawan bicara/pembaca, dan *sign meaning* berkenaan dengan makna yang dinyatakan oleh bahasa (kata-kata) yang digunakan dalam komunikasi itu.

Selanjutnya, Cruse (2000:331-333) menyatakan bahwa dalam komunikasi pembicara mengungkapkan suatu hal dengan daya ilokusi tertentu. Secara tegas Cruse menyatakan bahwa dalam komunikasi tidak ada wacana tanpa daya ilokusi. Konsekuensi logis pernyataan tersebut adalah bahwa sebuah wacana, yang dibentuk oleh konstituen-konstituen yang berupa kata, belum dapat digunakan sebagai instrumen komunikasi verbal jika tidak disertai dengan daya ilokusi. Dalam tindak komunikasi, sebuah wacana, yang hanya menampilkan makna lingual tanpa menampilkan ilokusi, tidak memuat pesan apa pun yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Sebagai akibatnya, perlokusi yang

merupakan konsekuensi atau efek pada kawan bicara tidak terjadi.

Austin (1962) mengelompokkan tindak tuturan ke dalam tiga tindakan, yakni *locutionary act*, *illocutionary act*, dan *perlocutionary act* (periksa Downes, 1988:307-309). *Locutionary act* berkenaan dengan tindak mengujarkan tuturan. *Illocutionary act* berkenaan dengan maksud pembicara yang terealisasi melalui wacana. *Perlocutionary act* berkenaan dengan konsekuensi atau efek yang ada pada kawan bicara.

Searle (1969) menyajikan klasifikasi tindak ilokusi menjadi lima, yakni *assertives*, *directives*, *commissives*, *expressives*, dan *declaratives* (Cruse, 2000:342). Berdasarkan klasifikasi tindak tutur serta macam-macam daya ilokusi yang menyertai tindak tutur tersebut, penelitian ini melihat daya ilokusi tersebut dari sisi negatif yang dihadirkan dalam wacana.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menemukan ketidakarifan dalam berbahasa, maka sisi negatif daya-daya ilokusi mengarah pada realisasi ketidakarifan dalam berbahasa. Daya ilokusi ini merupakan representasi pragmatis wacana.

Berkaitan dengan ilokusi kearifan, kesantunan dalam berbahasa merupakan salah satu wujud kearifan. Dalam membahas prinsip/maksim kesantunan, Leech (1988:131) menjelaskan bahwa kesantunan melibatkan dua pihak, yakni *self* dan *others*. *Self* dapat diartikan sebagai pihak penyapa dan *others* adalah pihak pesapa. Pihak pesapa dapat dibedakan juga menjadi dua, yakni partisipan tindak komunikasi dan nonpartisipan atau pihak ketiga yang dibicarakan. Dengan demikian, kesantunan dalam berbahasa mencakup tiga peran, yakni penyapa, pesapa, dan orang yang dibicarakan.

Tabel 1. Klasifikasi Tindak Tutur dan Ilokusi Ketidakarifan

Tindak Tutur	Ilokusi Ketidakarifan
asertif	mengeluh/komplain
	mendesak
	menuntut
direktif	memerintah
	memaksa
	membujuk
komisif	menghasut
	menyumpahi
	mengancam
ekspresif	kesal
	marah
deklarasi	menghakimi
	memberitahu (netral)
	memperingatkan

Tabel 2. Prinsip Kesantunan dan Ilokusi Ketidakarifan

Prinsip Kesantunan	Klasifikasi Ilokusi Ketidakarifan
kearifan	merugikan
kedermawanan	menuduh
	memfitnah
pujian	mengejek
	mengecam
	mengumpat
kerendahan hati	merendahkan
	melecehkan
kesepakatan	menentang/kontra
simpati	antipati

Tabel 3. Prinsip Wacana dan Klasifikasi Semantis

Prinsip Wacana	Klasifikasi Semantis
<i>quantity</i> 'kuantitas'	berlebihan
<i>quality</i> 'kualitas'	hiperbol
	lugas
	kebohongan
	tidak akurat
	kasar
<i>relation</i> 'hubungan'	tidak relevan
<i>manner</i> 'cara'	interpretatif
	metaforis
	eufemisme

Penelitian ini mengklasifikasikan ilokusi ketidakarifan yang menyangkut prinsip-prinsip kesantunan sebagaimana Tabel 2.

Grice (1991:308-309) dalam pembahasan tentang *logic and conversation* menjelaskan empat prinsip kerja sama dalam tindak komunikasi. Jika ditempatkan dalam kerangka pikir yang mengoposisikan aspek semantis dan aspek pragmatis, pengelompokan empat prinsip kerja sama yang disajikan oleh Grice tersebut merupakan representasi semantis wacana.

Tabel 3 di atas merupakan hasil klasifikasi semantis wacana yang ditemukan dalam penelitian ini dengan mengacu kepada prinsip kerja sama Grice. Hasil klasifikasi semantis yang tertera dalam Tabel 3 di atas merupakan bentuk ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kerja sama Grice tersebut.

2.3 Kearifan

Kearifan yang digunakan dalam penelitian ini berkenaan dengan perilaku manusia. Oleh karena itu, definisi operasional kearifan yang digunakan di sini adalah berperilaku sesuai dengan etika dan etiket yang berlaku di masyarakat. Perilaku yang tidak arif adalah perilaku yang melanggar etika dan etiket. Soeseno (1984:6)

mendefinisikan etika sebagai keseluruhan norma dan penilaian yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Apa yang harus dijalankan oleh manusia meliputi bagaimana ia harus membawa diri, bagaimana mengembangkan sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang memang seharusnya dijalankan. Bertens (2001:8-11) menjelaskan bahwa etika berkenaan dengan norma-norma sedangkan etiket berkenaan dengan sopan santun.

Sesuai dengan topik penelitian ini, kesantunan dalam wacana merupakan permasalahan yang penting. Pers tidak dapat menghindari dari masalah kearifan dalam membahasakan informasi yang disampaikan melalui media. Bahasa yang dijadikan wahana informasi selayaknya merupakan bahasa yang etis, bahasa yang tidak melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Pers sebagai media komunikasi massa tidak luput dari kewajiban untuk menaati etika pers. Soeseno (2001:128) menyatakan bahwa dalam masyarakat modern pers berfungsi sebagai sumber informasi dan pasar ide atau aspirasi masyarakat. Tanggung jawab moral yang menyertai kedua fungsi itu adalah: (1) tanggung jawab dalam menyajikan informasi, (2) tanggung jawab dalam mengemukakan penilaian, dan (3) tanggung jawab sebagai pasar ide bagi seluruh masyarakat. Tanggung jawab pers yang paling fundamental adalah tanggung jawab terhadap kebenaran. Pers wajib memberikan informasi secara benar.

2.4 Ruang Lingkup Penelitian

Teks wacana yang digunakan sebagai data tulis adalah Majalah Tempo dan Koran (Kompas, Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka). Rentang waktu terbitan yang digunakan sebagai data mulai dari tahun 2000—2003. Rubrik berita yang diambil sebagai data adalah Laporan/Berita Utama (pada Kompas dan Tempo), Editorial (pada Media Indonesia), serta judul-judul Berita Utama (pada Rakyat Merdeka). Pemilihan rubrik Editorial juga dilandasi oleh hadirnya publikasi Editorial dalam bentuk lisan di media elektronik. Dengan demikian, jika data Editorial diambil dari hasil perekaman pembacaan "berita" Editorial, maka data hasil rekaman merupakan data lisan (yang terencana).

2.5 Metode dan Teknik

Pemilihan data tertulis dilakukan berdasarkan topik berita yang secara aktual menjadi berita hangat dan yang mampu berpengaruh pada pergolakan situasi masyarakat. Parameter yang digunakan dalam tipe data aktual tersebut didasarkan atas keberlangsungan topik berita di berbagai media dan dalam rentang waktu yang signifikan.

Penjaringan data dilakukan dengan cara penyimakan. Korpus data wacana tulis dijarah dari satuan-satuan kalimat yang mengandung medan makna yang berkaitan dengan perilaku ketidakarifan. Korpus data wacana lisan dijarah dengan teknik rekam. Pertimbangan teknis dan waktu, data wacana lisan ini hanya digunakan sebagai pendukung analisis data wacana tertulis. Wacana lisan yang digunakan sebagai data pendukung adalah rekaman dialog interaktif dari Radio Jak-News FM dan Elshinta. Rentang waktu yang diambil sebagai data adalah rekaman siaran dari bulan September sampai November 2004.

Pemilahan korpus data dirancang untuk dapat menjawab tiga butir masalah penelitian yang telah ditetapkan. Selain itu, korpus data wacana yang mengandung tuturan sasaran penelitian dipilah-pilah berdasarkan jenis makna dan daya ilokusi yang ditimbulkan oleh satuan-satuan bahasa yang membentuk tuturan sasaran.

Analisis korpus data dilakukan dengan menggunakan analisis makna referensial dan kontekstual serta analisis pragmatis yang berkenaan dengan daya ilokusi tuturan. Istilah yang digunakan untuk menyebut korpus data, yang merupakan potongan wacana, adalah *teks*.

Istilah partisipan komunikasi yang akan digunakan dalam analisis adalah *penyapa* dan *pesapa*. Penyapa digunakan untuk menggantikan istilah pembicara, penulis, atau pengirim pesan (*sender*). Kata pesapa digunakan untuk menggantikan kata kawan bicara, pembaca, atau penerima pesan (*receiver*).

3. Analisis dan Interpretasi Data

3.1 Pilihan Kata

Pilihan kata merupakan instrumen penting bagi media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Komunikasi antara media massa dan masyarakat akan berjalan sesuai tujuan pemberitaan jika kesamaan makna antara penulis dan pembaca berita terjadi. Masyarakat sebagai penerima berita berkepentingan untuk memperoleh informasi dengan cara memahami makna dan maksud yang terkandung dalam bahasa (kata-kata) yang digunakan untuk merepresentasikan informasi tersebut.

Secara garis besar pilihan kata pada wacana di media massa yang ada pada masa Pascaorde Baru berbeda dengan pada masa sebelumnya. Pada masa Orde Baru kata-kata eufemisme sangat produktif, misalnya hadirnya kata (harga) *disesuaikan*, *dirumahan*, dsb. Pada masa Pascaorde Baru kata-kata yang hiperbolis, lugas, dan emotif lebih produktif. Eufemisme yang hadir pada masa Pascaorde Baru ini dihadirkan untuk maksud yang berbeda. Disadari atau tidak, oleh penulis, eufemisme dihadirkan justru menyatakan maksud yang tidak arif, antara lain untuk menyatakan ejekan,

kemarahan, kecaman, atau keluhan. Dhakidae (2003:361) menyatakan bahwa pada masa Orde Baru terdapat kombinasi tiga jenis bahasa yakni pemakaian akronim, eufemisme, dan disfemisme. Ketiga genre bahasa tersebut digunakan sebagai teknik dan teknologi kekuasaan yang dipakai dengan efektif.

Dari data yang berhasil dijarah ditemukan kata-kata emotif yang secara produktif dihadirkan untuk menyatakan kelugasan, penyngatan, atau pun pengasaran. Kata-kata emotif yang ditemukan dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis acuan (referen), yakni (a) tindakan/perilaku, (b) peristiwa, (c) karakter/sifat, (d) keadaan/situasi, dan (e) istilah. Kata-kata emotif di bawah ini adalah sebagian kata-kata emotif yang menurut peneliti ini mewakili kata-kata emotif yang dihadirkan dalam wacana di media.

- (a) tindakan/perilaku:
ngotot, tuding, gusur, gubris
- (b) peristiwa:
bantai, bunuh, habisi, tewas, teror
- (c) karakter/sifat:
buas, ganas, biadab, serakah
- (d) keadaan/situasi:
ancaman, bobrok, rusak, amburadul, borok, waras, gila, konyol, sinting, berdarah-darah, dendam
- (e) istilah:
skandal, pembobolan, kakap, dagang sapi, pentolan, biang kerok, keablasan

3.2 Latar Belakang Kehadiran Kata-Kata Emotif

Mengacu kembali kepada teori makna yang disajikan Ogden & Richards (1952), kehadiran sebuah kata diperlukan untuk memberi simbol sebuah objek yang hadir di dunia nyata. Teori Ogden & Richards ini memberikan petunjuk bahwa, kehadiran sebuah kata tidak diperlukan jika benda atau objek yang perlu dimaknakan tidak hadir. Berangkat dari teori tersebut, kehadiran kata-kata emotif yang produktif dihadirkan dalam media massa menunjukkan bahwa objek-objek yang perlu dimaknakan melalui satuan-satuan linguistik memang hadir dan perlu dikomunikasikan.

Sebuah tindakan memalukan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya menindak tegas tindakan tersebut merupakan objek – yang menurut insan pers – perlu diinformasikan dengan tujuan tertentu. Insan pers memerlukan satuan linguistik, dalam hal ini berupa kata atau frasa, bahkan kalimat, untuk membahasakan objek tersebut. Kata *berdarah-darah*, contohnya, perlu dipilih untuk menginformasikan sebuah keadaan yang menyedihkan akibat tindakan kekerasan, sekaligus perlu dikedam.

- (1) MALUKU kembali berdarah-darah. Kali ini, terjadi baku tembak antara Brimob dan Kopassus-- aparat yang seharusnya menegakkan ketertiban dan memulihkan keamanan. (12202-139)

Frasa *saling bantai*, yang secara referensial menyatakan makna yang sangat mengerikan, dianggap perlu dihadirkan untuk menginformasikan sebuah peristiwa yang memang produktif terjadi di masyarakat.

(2) *Perkelahian yang setahun lalu hanya terjadi di sebuah jalan di pasar Ambon, kini menyulut semangat kebencian massal di seluruh provinsi untuk saling membantai.* (12200-005)

Peristiwa penghilangan nyawa manusia secara massal dan berulang-ulang menjadikan objek, yang berupa peristiwa itu, perlu dikomunikasikan kepada publik secara lugas tanpa ada pengurangan informasi. Sudah sewajarnya, selain tujuan yang sifatnya informatif tersebut, pers tentu memiliki tujuan-tujuan lain yang berkenaan dengan penilaian terhadap peristiwa yang diberitakan.

Jika bertolak dari pemaknaan kata *ngotot* dan *tuding* secara referensial, kedua kata tersebut selayaknya tidak hadir dalam situasi yang bersifat formal dan tidak ditujukan kepada setiap partisipan wacana. Kata *ngotot* dan *tuding* merupakan kata-kata yang bernilai rasa negatif. Pertanyaannya adalah, mengapa kedua kata itu sangat produktif muncul dalam media massa? Bertolak dari teori Ogden & Richards tersebut, kehadiran objek yang berupa peristiwa, orang, atau tindakan yang perlu ditanggapi secara kasar dan negatif tersebut, barangkali, memang produktif terjadi di masyarakat.

(3) *Yang ngotot naik gaji, pejabat budeg nurani.* (12300-024)

(4) *MPR pasti akan bersidang untuk mengevaluasi kinerja Gus Dur bila tetap ngotot dengan rencana itu.* (12200-164)

(5) *Putusan ini membuat tidak cuma pengadilan dituding telah "bermain mata", tapi penuntut umum juga disinyalir sengaja memformulasikan dakwaan yang "tak cukup komprehensif".* (11102-146)

Seiring dengan situasi masyarakat masa Pascaorde Baru yang dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya buruk, rusak, maka kata *bobrok* hadir untuk memenuhi kebutuhan leksikal dalam membahasakan situasi tersebut.

(6) *Apalagi, pemerintah ini mewarisi kebobrokan rezim Orde Baru di hampir semua sisi kehidupan masyarakat.* (11100-088)

Sisi-sisi kehidupan masyarakat yang pada masa orde baru dianggap sebagai kehidupan yang buruk, rusak, pada masa pascaorde baru berulang kembali bahkan di semua sisi. Kerusakan yang dianggap parah di semua sisi, menurut pers, perlu diinformasikan secara lugas tanpa ada pengurangan informasi. Kata *bobrok* menjadi kata yang tepat untuk membahasakan situasi buruk kehidupan masyarakat yang memang produktif tersebut.

(7) *Tapi itu bukan berarti Garuda bisa diperas-peras lagi. Jika operasinya tetap bobrok, jika badannya tetap digerogoti tikus-tikus serakah, suntikan modal itu tak berumur lama.* (11100-105)

(8) *Hukum yang terseok-seok oleh kebobrokan mentalitas aparat hukum itu sendiri.* (12202-006)

Tindakan korupsi yang terus-menerus terjadi di Garuda, mentalitas aparat hukum yang dianggap selalu membuat citra buruk hukum di Indonesia merupakan objek yang memerlukan satuan linguistik, kata, yang tepat untuk membahasakan situasi tersebut. Kata *bobrok* kembali dihadirkan untuk memenuhi ekspresi emotif yang terjadi di masyarakat.

Pada perjalanan gerakan reformasi perilaku elit-elit politik, yang pada awalnya menjadi tumpuan harapan perbaikan, rupanya dinilai tidak menunjukkan keberpihakan pada perbaikan secara menyeluruh. Elit-elit politik seakan-akan dianggap tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat. Lembaga peradilan dengan slogan penegakan hukum (*law enforcement*) yang menunjukkan kinerja buruk tidak lepas dari penilaian masyarakat. Kemarahan masyarakat terhadap para elite politik maupun lembaga peradilan itu memicu otoritas-otoritas masyarakat memberikan penilaian. Penilaian yang diberikan kepada mereka, dengan mengacu kepada perilaku buruk yang dilakukannya serta pemaknaan perilaku mereka, dibahasakan dengan kata *busuk*. Mengacu kepada komponen makna kata *busuk*, segala hal yang telah *busuk* adalah segala hal yang kotor, dapat menimbulkan kuman penyakit, tidak berguna lagi, dan hanya pantas untuk dibuang. Secara emosional, barangkali, kata *busuk* sengaja dihadirkan untuk membahasakan hal tersebut.

(9) *Sebab, hukum tidak runtuh oleh karena lemahnya argumentasi, melainkan oleh busuknya pengadilan.* (12200-094).

(10) *Reformasi, bagi rakyat, memang telah menjadi slogan busuk.* (12200-695).

(11) *Untuk itulah, partai-partai lain tak usah ngeper menghadapi gertakan Golkar jika mereka memang tidak mempunyai borok. Jika mereka memang tidak busuk! Tetapi, kalau sama-sama busuk, ya, urusannya memang lain.* (12201-576).

(12) *"Kenapa kader partai ternyata busuk-busuk begini?" tanya mereka. Kwik cuma ikut menyalkan.* (11102-285).

Berdasarkan kemunculan kata-kata emotif yang berhasil dijaring tersebut dapat diambil kesimpulan berikut:

- 1) Tindakan, perilaku, maupun peristiwa yang sifatnya negatif dan tidak arif terjadi secara produktif di masyarakat.
- 2) Tindakan, perilaku, maupun peristiwa yang sifatnya negatif dan tidak arif yang terjadi di masyarakat

tersebut mampu memicu otoritas masyarakat untuk menghadirkan kata-kata yang bersifat emotif.

- 3) Perilaku otoritas masyarakat yang emosional teraktualisasikan dalam media massa melalui pilihan kata yang tidak arif.

3.3 Analisis Kontekstual Kata-kata Emotif

Tahapan pertama yang dilakukan lebih dahulu dalam analisis ini adalah analisis makna secara referensial. Tahapan ini merupakan tahapan makna satuan bahasa yang terlepas dari maksud si penyapa. Mengacu kembali kepada tiga aspek makna dalam komunikasi yang disampaikan oleh Cruse (2000:6), tahapan analisis referensial ini adalah aspek makna yang kedua, yakni *sign meaning*. Pembahasan makna referensial yang dilakukan di sini menggunakan analisis komponen.

Berdasarkan hasil analisis komponen tersebut, analisis tahap kedua yang berkenaan dengan *speaker's meaning*, dalam hal ini makna pragmatis sebuah kata yang digunakan untuk menyatakan maksud subjektif si penyapa, dapat ditemukan. Makna pragmatis yang dibahas dalam penelitian ini berkenaan dengan daya ilokusi yang dihadirkan melalui kata. Ilokusi yang dihadirkan melalui frasa dan kalimat akan dibahas jika secara potensial korpus data tersebut memberikan petunjuk wacana kearifan.

Hasil analisis semantis dan pragmatis terhadap teks wacana dalam data yang ditemukan menunjukkan bahwa klasifikasi wacana dan ilokusi yang dihadirkan dalam teks didominasi oleh:

- a. klasifikasi wacana: lugas, hiperbolis, kasar, metaforis, berlebihan;
- b. klasifikasi ilokusi: memberi tahu, mengecam, mengeluh, marah, mengejek, merendahkan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hadirnya dominasi teks di atas adalah bahwa kelugasan dalam penyampaian informasi merupakan ciri utama media pada masa Pascaorde Baru. Masa yang direpresentasikan dengan kata "keterbukaan" atau "transparansi" ini menuntut pembahasan sebuah berita secara lugas, tanpa basa-basi.

Tabel 4. Klasifikasi Wacana

No	Klasifikasi Semantis Teks	Persentase Dominasi (dalam %)			
		TMP	KMP	MD	RM
I	Lugas	41,5	49,7	35,5	34,9
II	Hiperbolis	18	8	20,6	6,9
III	Kasar	10	2	15,4	32,7
IV	Metaforis	2,9	4,9	9,9	6,8
V	Berlebihan	5,6	4,9	5	4,7
VI	Lain-Lain	22	30,5	13,6	14

Tabel 5. Tindak Ilokusi

No	Klasifikasi Pragmatis Teks	Persentase Ilokusi (dalam %)			
		TMP	KMP	MD	RM
I	memberi tahu	10,5	27,5	8,2	0,5
II	mengecam	8,4	4,3	15,5	11,4
III	mengeluh	8	7,8	13,5	1,4
IV	marah	6	5,9	12,8	5,7
V	menejek	7,9	3	6,9	14
VI	Merendahkan	5,7	4,2	3,4	6,6
VII	lain-Lain	53,5	42,7	39,7	60,4

Hal positif yang ditemukan melalui penelitian ini adalah bahwa kehadiran tindak menginformasikan secara rata-rata masih menempati urutan teratas dari semua tindak ilokusi yang dihadirkan melalui teks. Tindak ilokusi yang mengikuti adalah tindak mengecam, mengeluh, marah, mengejek, dan merendahkan. Setiap media memiliki kecenderungan menampilkan dominasi tindak ilokusi yang berbeda.

3.4 Penggeseran Makna

Secara normatif, setiap kata memiliki nilai kepatutan dalam penggunaannya. Jika secara normatif sebuah kata tidak pantas digunakan dalam komunikasi publik, maka penggunaan kata tersebut lazimnya dihindari. Dalam perkembangan kebahasaan pada saat ini, setidaknya yang ditemukan dalam data penelitian ini, profil kebahasaan di masa Pascaorde Baru nampaknya mengalami proses penggeseran. Kosakata yang pada mulanya merupakan kosakata yang tidak pantas digunakan rupanya bergeser menjadi kosakata yang lazim. Kelaziman penggunaan kosakata tersebut ditandai dengan produktivitas kehadiran kosakata tersebut dalam wacana. Kosakata tersebut tidak hanya dihadirkan oleh pers, sebagai pesapa, tetapi juga oleh otoritas publik yang melakukan komunikasi di media. Kosakata yang dapat dikategorikan mengalami penggeseran menuju pada kelaziman adalah sebagai berikut:

- *tuding, tudingan, menuding, dituding*
- *ngotot*
- *borok*
- *bobrok*
- *busuk*
- *kakap*
- *gubris, menggubris, digubris*
- *pentolan*
- *skandal*

Berdasarkan data yang berhasil dijaring, setiap media memiliki kecenderungan yang berbeda dalam melakukan penggeseran makna. Hal ini menunjukkan bahwa penggeseran makna kata dari ketidakpatutan

menjadi kelaziman masih berada dalam proses. Pergeseran makna benar-benar terjadi jika semua media memiliki kecenderungan yang sama dalam penggeseran makna kata.

Penggunaan kata *tuding*, *tudingan*, *menuding*, *dituding* ditemukan di semua media yang diteliti. Dari tahun 2000—2003 kata-kata tersebut produktif digunakan untuk menggantikan kata *tuduh*, *tuduhan*, *menuduh*, *dituduh*. Jika berangkat dari pendekatan bahasa hukum, maka kata *tuduh*, dan bentuk turunannya, terasa lebih lugas daripada kata *tuding*. Seseorang yang dikenai “tuduhan” adalah seseorang yang mendapat “cela”, terlepas apakah tuduhan itu sudah terbukti kebenarannya atau belum. Cela yang diakibatkan oleh tuduhan itu mulai dialami sejak kata *tuduh* dihadirkan dalam wacana. Penyulihan kata *tuduh* dengan kata *tuding* seakan menetralkan cela bagi pihak yang tersapa oleh teks wacana yang mengandung kata *tuding*. Kata *tuding* “seakan” menjadi kata yang eufemistik bagi kata *tuduh*. Oleh karena itu media tanpa segan-segan lagi memanfaatkan kata *tuding* secara produktif. Hipotesis yang dapat diajukan berkenaan dengan keproduktifan kata *tuding* ini adalah bahwa bagi pesapa, baik media maupun otoritas publik, kata *tuding* merupakan kata yang netral tanpa memiliki komponen makna emotif.

(13) *Ia menambahkan, "Silakan hukum yang menyelesaikan kalau memang ada prajurit TNI yang terlibat. Kalau tidak ada bukti jangan asal tuding."* (12102-211)

Kata *ngotot* juga menunjukkan kecenderungan pergeseran makna yang sama dengan kata *tuding*. Secara referensial kata *ngotot* yang sepadan dengan kata *bersikeras*, *memaksa*, *memaksakan kehendak* lebih produktif digunakan daripada kata atau frasa padanannya yang relatif lebih santun. Otoritas publik yang diacu oleh kata *ngotot* ini tidak disertai dengan pertimbangan tentang status, kedudukan, atau pun sikap penghormatan yang perlu diberikan kepada otoritas yang dibicarakan dalam teks wacana.

(14) *Untunglah Gus Dur tak ngotot. Priyadi dicoret dari posisi Menkeu diberikan kepada ekonom kondang dari Universitas Indonesia, Sri Mulyani.* (111000-495)

Pada teks (14) tindakan *ngotot* dilakukan oleh seorang Presiden. Si penyapa dalam teks di atas seolah tidak perlu lagi mempertimbangkan norma-norma kepantasan apakah kata *ngotot* dapat ditujukan kepada otoritas publik yang dibicarakan dalam wacana tersebut. Pertimbangan kepantasan tersebut tidak diperlukan bagi si penyapa, karena – secara hipotetis – kata *ngotot* sudah termasuk dalam kosakata netral, tidak mengandung komponen makna emotif.

Kata-kata berikutnya yang dapat diduga mengalami pergeseran makna adalah kata *borok*, *bobrok*, dan *busuk*. Kata-kata yang secara referensial digunakan untuk mengacu kepada objek yang berupa benda/barang yang tidak berguna tersebut secara produktif digunakan untuk mengacu kepada manusia dan/atau tindakan/perilakunya.

(15) *Di mata mereka, Jaksa Agung sangat lamban mengorek tiga borok, yakni kasus penyelewengan dana Tabungan Perumahan, (Taperum), dana non-neraca Bulog, serta korupsi di Departemen Pertambangan dan Energi.* (11101-196)

(16) *Apa yang dijelaskan Kepala Polres Sumedang itu selaras dengan tuntutan banyak warga Bandung, yang juga menginginkan semua "borok" di STPDN dibuka saja.* (12103-191)

Kata *borok* yang lazimnya hanya digunakan untuk membicarakan suatu penyakit kulit dalam konteks/topik pembicaraan (*field of discourse*) yang juga mengenai penyakit. Oleh karena penyakit yang disebut dengan kata *borok* adalah penyakit yang menjijikkan, maka penyebutan atau pengucapan kata *borok* seringkali dihindari agar suasana percakapan tidak terganggu.

Kata *borok*, dalam perkembangan di era reformasi ini, digunakan untuk merepresentasikan sebuah penyakit masyarakat yang berkenaan dengan perilaku penyelewengan, korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan sebagainya. Kata *borok* bukan lagi merupakan kata yang perlu dihindari karena makna ke-“jijik”-annya akan tetapi perlu digunakan secara lugas untuk menyatakan kekesalan atau kecaman.

Tidak jauh berbeda dengan pergeseran makna pada kata *borok*, kata *busuk* juga hadir bukan untuk merepresentasikan suatu objek yang berupa benda tak berguna, rusak, kotor dan tidak dalam konteks yang sebenarnya. Kata *busuk* digunakan untuk mengacu kepada tindakan, perilaku atau karakter seseorang. Kata *busuk* bukan lagi merupakan kata yang menunjukkan makna ‘menjijikkan’, sehingga penggunaannya perlu dihindari, akan tetapi justru dimanfaatkan secara lugas untuk menyatakan pesan-pesan yang dianggap penting diketahui.

(17) *Teten Masduki, Ketua Indonesia Corruption Watch menetapkan empat dosa yang menyebabkan seseorang layak disebut politikus busuk.* (12203-253)

(18) *Betapa busuknya proses politik yang telah terjadi," ujar Bambang sambil menyobek Rantap itu.* (12102-155)

Kata *busuk*, baik dalam teks (17) maupun (18), menjadi sebuah “sebutan” bagi tindakan, perilaku, atau karakter elite politik yang buruk dan tercela. Untuk kepentingan kelugasan informasi aspek kepantasan dan kesantunan

penggunaan sebuah kata dalam konteks formal tidak lagi menjadi kaidah sosial yang membatasi. Penggunaan kata *busuk* untuk mengacu kepada tindakan, perilaku, atau karakter yang tercela tidak lagi mempertimbangkan kaidah sosial yang berkenaan dengan aspek kepantasan dan kesantunan.

Untuk menyatakan rasa kekesalan, kecaman, keluhan, atau kemarahan terhadap pengelolaan negara yang dianggap layak menerima hukuman sosial tersebut, maka kata *bobrok* digunakan. Pelanggaran atas penggunaan kata *bobrok*, yang berkenaan pelanggaran kaidah normatif dalam berbahasa, kurang dirasakan lagi.

(19) *Kebijakan pembangunan yang sentralistik dengan birokrasi yang bobrok telah membuat dunia pendidikan kita hancur.* (12200-483)

Kata *bobrok* menjadi kata sebutan bagi keadaan birokrasi yang buruk. Segala keburukan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menjadi alat legitimasi untuk memanfaatkan kata *bobrok* sebagai kata yang netral dalam konteks wacana yang formal.

Selain pada kosakata, pergeseran makna ditemukan pula pada sapaan penghormatan. Seiring dengan gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, persamaan hak, dan sebagainya, rupanya penggunaan bentuk sapaan yang bersifat penghormatan mulai berkurang. Dalam sebuah wacana publik, isi berita dan kejelasan informasi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi. Sebagai akibatnya, sapaan yang bersifat penghormatan tidak merupakan prinsip yang harus dipenuhi.

(20) *Artinya, jika melawan arus, Mega bukan tidak mungkin bisa tergilas.* (11100-669)

(21) *Karena seperti Yusril di Suharto ada, di Habibie ada, di Gus Dur ada, di Mega ada, dan sekarangpun juga ada, belakang Pak SBY juga ada, iya kan?* (23103-025)

(22) *Ironis, memang. Lopa pasti tidak kaget dengan hal ini. Lalu, di tengah rimba mahluk yang haus keserakahan, apakah seruan moral seorang Lopa bisa didengar?* (12202-192)

Berdasarkan atas teks-teks (20)—(21) di atas, hilangnya sapaan penghormatan selain berkaitan dengan faktor ilokusi dalam menyampaikan informasi juga berkaitan dengan perilaku otoritas yang dibicarakan. Namun demikian, seorang tokoh yang dipuji akan kebersihannya, yakni Jaksa Agung Baharudin Lopa, dalam teks (22) disapa dengan tidak disertai sapaan penghormatan, misalnya *Pak Lopa* atau penyebutan jabatan dan nama lengkap. Kasus hilangnya sapaan penghormatan kepada Jaksa Agung Baharudin Lopa ini mengindikasikan bahwa bentuk sapaan penghormatan bukan merupakan hal yang diperlukan jika dibandingkan dengan isi berita yang ingin diinformasikan.

Pada teks (21), "SBY" adalah otoritas yang disebut dengan menggunakan sapaan penghormatan *Pak*. Di antara otoritas lain yang hadir di media, tokoh "SBY" pada saat itu memang tokoh yang dihormati, sehingga sapaan penghormatan secara spontan dinyatakan oleh si penyapa. Jika dibandingkan dengan teks (22), fokus isi berita pada teks (21) tidak berada pada *Pak SBY* dan isi berita bukan merupakan hal penting yang ingin diinformasikan kepada masyarakat. Pada teks (22), isi berita merupakan hal penting yang perlu dipahami dan disadari bersama oleh masyarakat, yakni seruan moral.

4. Simpulan

Kelugasan dalam penyampaian informasi merupakan ciri utama media pada masa Pascaorde Baru. Seiring pula dengan tanggapan sebagian masyarakat terhadap perjalanan reformasi yang direpresentasikan dengan frasa "reformasi kebablasan", kelugasan dalam penyampaian informasi tersebut rupanya juga diikuti oleh hadirnya penyampaian informasi dengan bahasa yang hiperbolis dan kasar.

Kecaman, keluhan, kemarahan, ejekan, serta perendahan yang hadir merupakan akibat dari peristiwa ketidakarifan yang produktif terjadi di negara ini. Peristiwa atau fakta berita yang memicu hadirnya ketidakarifan dalam bahasa dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori topik berita. Pertama, topik berita yang berkenaan dengan tindakan atau perilaku, yakni: korupsi, teror, dan saling bunuh. Kedua, topik yang berkenaan dengan peristiwa, yakni: pembunuhan, konflik berdarah, perusakan, dan teorisme. Ketiga, topik berita yang berkenaan dengan sifat atau karakter, yakni: nafsu permusuhan, kekajaman, dan keserakahan. Keempat, topik berita yang berkenaan dengan situasi atau keadaan, yakni: terancam, balas dendam, kebablasan atau situasi yang tidak terkendali, dan rusak.

Untuk mewujudkan kearifan dalam mewacanakan informasi di media, maka satuan-satuan bahasa yang sebaiknya digunakan adalah:

- 1) kata/frasa dengan makna lugas yang mengacu kepada orang, objek, otoritas, atau peristiwa, yang secara referensial dan kontekstual, sesuai dengan fakta;
- 2) kata/frasa dengan makna lugas yang merepresentasikan ilokusi memberitahukan atau menginformasikan;
- 3) kata/frasa dengan makna lugas yang secara normatif menunjukkan kepantasan berbahasa sesuai dengan tuntutan normatif topik dan/atau konteks wacana;
- 4) kata/frasa dengan makna kias yang tidak mempersamakan atau memperbandingkan orang, objek, otoritas, institusi, atau peristiwa dengan objek lain yang secara normatif menurunkan harkat dan martabat;

- 5) teks wacana yang tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan tindak komunikasi yang melanggar prinsip kesantunan;
- 6) teks wacana yang tidak memanfaatkan kosakata yang belum diterima sebagai kosakata kepantasan yang telah lazim digunakan dalam komunikasi;
- 7) teks wacana yang tidak mencampuradukkan konteks informal ke dalam wacana formal;
- 8) teks wacana yang tidak menghilangkan sapaan penghormatan.

Kearifan yang berkenaan dengan etika pers dapat diwujudkan dengan cara:

- 1) menyampaikan informasi secara efektif tanpa memicu timbulnya perilaku ketidakarifan bagi semua pihak yang memperoleh informasi yang bersangkutan;
- 2) membangun transparansi dalam pemberitaan tanpa melanggar hak *privacy* yang belum menjadi hak publik;
- 3) memberikan penilaian secara adil dan bijak dengan menyajikan argumen yang benar;
- 4) bersikap objektif dan berpihak kepada kebenaran.

Berkean pelaku kearifan dalam berbahasa, penelitian ini menemukan bahwa, secara berturut-turut, pers, pejabat negara, elit politik, pengamat adalah otoritas yang berperan dalam menumbuhkembangkan kearifan dalam masyarakat. Pers sebagai media massa yang menyajikan informasi, memberikan penilaian, serta menampung opini publik, memiliki posisi yang strategis dalam pencerdasan emosi masyarakat melalui bahasa.

Sebagai konsekuensi logis terhadap hadirnya ketidakarifan wacana publik dalam media, maka para pelaku, pemrakarsa, serta otoritas yang berwenang dalam penyelesaian permasalahan ketidakarifan yang tercakup dalam keempat topik berita di atas memiliki tanggung yang sama dalam menumbuhkembangkan kearifan.

Kesimpulan umum yang ditemukan dalam penelitian profil kebahasaan dalam media pada masa Pascaorde Baru ini adalah:

- 1) kearifan dalam berbahasa tidak berkaitan dengan tindakan manipulatif dalam penyampaian informasi;
- 2) kearifan adalah tanggung jawab bersama dan harus ditumbuhkembangkan oleh semua pihak;
- 3) kearifan tidak memperdebatkan tuntutan hak dan kebebasan berwacana;
- 4) kebebasan tidak perlu diperdebatkan jika kearifan telah dimiliki dan dihayati bersama.

Permasalahan selanjutnya yang perlu dijawab dalam penelitian lanjutan adalah, benarkah masyarakat penerima informasi menangkap makna kosakata “ketidakarifan” tersebut sebagai kosakata yang bukan

merupakan kosakata “ketidakarifan”? Benarkah semua kosakata yang disajikan merupakan kosakata yang lazim dan perlu diberdayakan untuk menyajikan berita secara transparan dan lugas? Jika kedua pertanyaan tersebut dijawab “YA”, sepadan dengan jawaban penulis teks di media, maka yang terjadi adalah terbentuknya pergeseran makna. Jika pergeseran makna semua kosakata menuju ke arah kelaziman seperti yang terjadi pada kata *tuding* dan *ngotot*, maka profil bahasa Indonesia pun telah mengalami pergeseran. Pernyataan ini bersifat hipotetis yang perlu dikaji secara mendalam dalam penelitian lanjutan.

Daftar Acuan

Abrar, Ana Nadhya. 1997. *Bila Fenomena Jurnalisme direfleksikan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Aitchison, Jean. 1990. *Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon*. Cambridge: Basil Blackwell.

Barthes, Roland. 1967. *Elements of Semiology*. London: Jonathan Cape, Ltd.

Bertens, K. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. (rev. ed.). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

... 2001. *Etika*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Brown, Gillian and George Yule. 1989. *Discourse Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, Penelope and Stephen C. Levinson. 1987. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.

Cruse, D. Alan. 1991. *Lexical Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.

... 2000. *Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics*. New York: Oxford University Press.

Davis, Steven. (ed.) 1991. *Pragmatics: A Reader*. New York: Oxford University Press.

Dhakidae, Daniel. 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Downes, Williams. 1988. *Language and Society*. London: Fontana Paperbacks.

Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of language*. New York: Longman Group Limited.

- Grice, H.P. 1991. "Logic and Conversation", dalam *Pragmatics: A Reader*. New York: Oxford University Press.
- Gunarwan, Asim. 1994. "Kesantunan Negatif di Kalangan Dwibahasawan Indonesia-Jawa di Jakarta: Kajian Sosiopragmatik", dalam *Analisis Klausa, Pragmatik, Wacana, dan Pengkomputeran Bahasa*. Jakarta: Lembaga Bahasa Atma Jaya.
- Halliday, M.A.K. 1978. *language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Edward Arnold.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Senuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Hudson, R.A. 1990. *Sociolinguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kaswanti Purwo, Bambang. 1994. ed. *PELLBA 7: Analisis Klausa, Pragmatik, Wacana, dan Pengkomputeran Bahasa*. Jakarta: Lembaga Bahasa Atma Jaya.
- Leech, Geoffrey. 1988. *Principles of Pragmatics*. London and New York: Longman.
- Lyons, John. 1986. *Language Meaning & Context*. Sufflok: Fontana Paperbacks
- ... 1989. *Semantics*. I. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levinson, Stephen C. 1989. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Littlejohn, Stephen W. 1996. *Theories of Human Communication*. USA: Wadsworth Publishing Company.
- Nöth, Winfried. 1990. *Handbook of Semiotics*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Nuyts, Jan and Eric Pederson. 1999. *Language and Conceptualization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ogden, C.K & I.A. Richard. 1952. *The Meaning of Meaning*. London: Routledge & Kegan Paul LTD.
- Peirce, C.S. 1940. *Selected Writin*. Ed. By J. Buchlev. New York, London: Harcourt, Bruce & Co.
- Rahyono, F.X. 2002. "Representamen Kebudayaan Jawa: Teknik Komparatif Referensial pada Teks Wedhatama", dalam *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*. Vol. 4 No.1, April 2002. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Santosa, Anang. 2003. *Bahasa Politik Pascaorde Baru*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Saussure, Ferdinand de. 1988. *Pengantar Linguistik Umum*. Terjemahan: Rahayu S Hidayat. Seri ILDEP. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Searle, J.R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ... 1991 "What Is a Speech Act?", dalam *Pragmatics: A Reader*. New York: Oxford University Press.
- Soeseno, Franz Magnis. 1984. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- ... 2001 *Kuasa & Moral*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Verschueren, Jef, Jan-Ola Östman, Jan Blommaert. 1995. *Handbook of Pragmatics: Manual*. The Netherlands: John Benjamin B.V.